



PARLEMENTARIA

Pengawasan Duplikasi Jembatan Kapuas I

KETUA Komisi IV DPRD Kalimantan Barat, Subhan Nur mendorong tahap lelang pembangunan duplikasi Jembatan Kapuas (JK) I Pontianak selesai dan tidak ada kendala. Bahkan pengerjaannya harus sesuai dengan yang direncanakan. Dukungan tersebut disampaikan melihat semakin macetnya jalan-jalan di Pontianak pada jam-jam tertentu. "Fungsi duplikasi JK 1 Pontianak salah satunya memang untuk memutus mata rantai, kemacetan di Pontianak," ungkapnya, beberapa waktu lalu.



Menurutnya, seluruh komponen masyarakat di Kalbar harus mendukung duplikasi JK 1 segera terwujud. Masalahnya kehadiran infrastruktur seperti jembatan, jalan dan infrastruktur lain bakalan memiliki dampak untuk ekonomi masyarakat Pontianak dan Kalbar.

Sambungan dari halaman 9

"Intinya mempercepat dan memperlancar arus barang dan jasa. Itu yang dibutuhkan untuk warga Pontianak. Kehadiran duplikasi JK 1 adalah salah satu solusinya," ucap dia.

Dia meminta siapapun nantinya menjadi pemenang tender, untuk progres pengerjaan dan pelaksanaan harus sesuai target. Kalau perlu akhir tahun 2023 atau awal 2024 mendatang sudah dapat diujicobakan bagi masyarakat pemakai kendaraan dua dan empat. Di sisi lain, dia berharap fungsi pengawasan juga dilakukan maksimal supaya pembanguan JK 1 dapat maksimal. "Kami juga berharap sekali

pagu dana APBN sebesar Rp267.551.187.000 akan cukup membentangi jalur JK 1 yang sebelumnya rawan kemacetan pada jam-jam sibuk," katanya.

Sebelumnya, Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menyebutkan pembebasan lahan sudah selesai dan tidak ada kendala, kini duplikasi Jembatan Kapuas 1 sudah masuk dalam tahap lelang. "Nah jika selesai lelang diperkirakan antara bulan Juni atau Juli mendatang sudah mulai dikerjakan," ujar Lasarus. Dia berharap proses pembangunan duplikasi Jembatan Kapuas 1 dapat selesai tepat waktu sesuai tahapannya. "Jadi, dapat difungsikan cepat juga untuk masyarakat Pontianak dan Kalbar," ucapnya.

Dalam *lpse.pu.go.id* Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI melalui Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 1 Kalbar akhir pendaftarannya yakni 13 Mei 2022. Anggarannya dari APBN tahun 2022 dengan nilai pagu paket mencapai Rp 267.551.187.000,00, dengan kualifikasi usaha besar.

Sementara program pengawasan teknis duplikasi JK 1 untuk pengadaan jasa konsultasi Badan Usaha Konstruksi mencapai Rp3.792.862.000,00. Pendaftaran akhir tender juga akan berlangsung pada 13 Mei 2022. Untuk slot pendaftaran tender setidaknya 49 perusahaan. Sampai sekarang belum diketahui siapa pemenangnya. (den)